

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konpress.

Miftah Toha. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Didik Supriyanto dan Lia Wulandari. 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik*.

Jakarta: Yayasan Perludem.

Sidik Pramono. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sulistyowati dan Sidharta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konsultasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rianto Adi. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Inu Kencana Syafie. 2000. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Widjanarko Puspojo. 2012. *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955-2009*. Solo: Era Adictira Intermedia.

Miriam Budiarto. 2003. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rusadi Kantaprawira. 1988. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.

Jimly Asshidiqie. 1998. *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

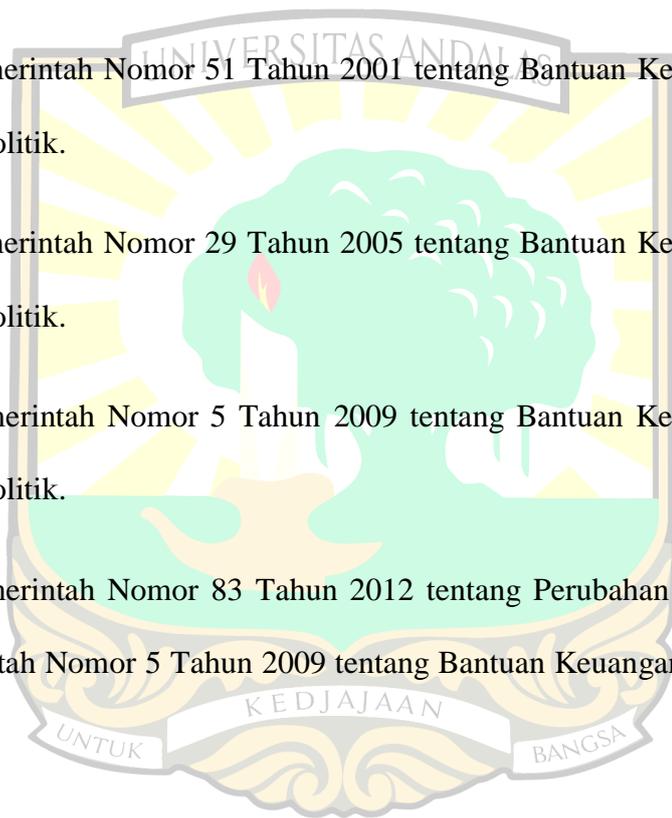
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik



C. Internet

<http://id.Tulisan-Bantuan-Parpol>.

http://id.2012_11_19_02_17_40_SumbanganPartai_rev.

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia

Joseph Adrianus Maryadi. *Partai Politik dan Seluk Beluknya.*

<http://apostleadrianus.wordpress.com/2013/03/12/795/>

http://ashariacca.blogspot.com/2013/07/sejarah-partai-politik_11.html.

<http://bloggong.co.id/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai-politik-di-indonesia>.

http://www.academia.edu/4567175/Bantuan_Keuangan_Partai_Politik.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah_di_Indonesia

<http://masterderechten.blogspot.com/2010/11/tinjauan-umum-mengenai-konsep-otonomi.html>.

